



UPACARA PERINGATAN HUT RI KE-72 DI LINGKUNGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Berempat di halaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 17 Agustus 2017 diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Tahun 2017. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 ini adalah Indonesia Kerja Bersama, dengan slogan Kerja Bersama, Bersama Kerja. Selaku Komandan Upacara kali ini adalah Ketua Tim Senior, **Heribertus Kurniawan** dengan Inspektur Upacara Kepala Perwakilan, **Ida Sundari**.

Tema "Indonesia Kerja Bersama" diangkat dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tahun ini untuk mengingatkan kembali bahwa Bangsa Indonesia mempunyai budaya gotong royong. Sejarah membuktikan bahwa semangat gotong royong dapat menjadi perekat sosial yang membangun kebersamaan dan harmoni di antara keberagaman ras, suku, dan agama.

Dalam sambutannya Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara yang dibacakan oleh Inspektur Upacara menyampaikan bahwa di usia negara kita yang ke-72 ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momentum kemerdekaan kali ini dengan meneladani perjuangan para pahlawan, sekaligus mengisi kemerdekaan melalui pelaksanaan tugas kita di BPK.

Prinsip kerja sama dan gotong royong sesuai slogan "Kerja Bersama, Bersama Kerja", sejalan dengan upaya kita dalam membangun sinergi bersama untuk meningkatkan kualitas dan manfaat kelembagaan BPK. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan publik, terutama pada saat BPK sedang mendapatkan sorotan publik.

Untuk meningkatkan kualitas dan manfaat kelembagaan BPK ini, kita perlu memperkuat implementasi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik. Apabila ada dugaan pelanggaran kode etik, sebaiknya diingatkan dan jika perlu dilaporkan ke Majelis Kehormatan Kode Etik. Selain itu, Quality Control dan Quality Assurance juga harus ditingkatkan efektivitasnya.

Selain itu ketua BPK juga menyampaikan meskipun lembaga kita mendapat sorotan publik, namun kita patut bersyukur atas capaian BPK pada akhir-akhir ini. Pertama, laporan keuangan BPK Tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan akuntabilitas kinerja BPK merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dengan predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perbaikan kualitas akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah saat ini juga tidak lepas dari peran BPK melalui rekomendasi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Di dunia internasional, BPK dipercaya kembali memimpin Kelompok Kerja Pemeriksaan Lingkungan Organisasi Lembaga Pemeriksa sedunia (INTOSAI) periode 2017-2019. Selain itu, BPK menjadi pemeriksa eksternal Laporan Keuangan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) periode 2016-2017 yang diperpanjang sampai dengan tahun 2022. BPK juga ditetapkan sebagai Sekretariat ASEANSAI untuk periode 2018 – 2023.

Diakhir sambutannya Ketua BPK mengajak kepada seluruh Pegawai di Lingkungan BPK RI untuk senantiasa bekerja bersama dan tetap memegang teguh integritas, independensi, dan profesionalisme untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPK. Dan selalu berdo'a semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam membangun bangsa dan negara. Semoga semua langkah kita dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada peringatan Upacara HUT RI ke-72 Tahun 2017 kali ini Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65/TK/TAHUN 2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya terdapat empat pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang mendapat penghargaan atas pengabdianya sebagai PNS sekurang-kurangnya sepuluh tahun, dua puluh tahun, atau tiga puluh tahun. Adapun pegawai yang mendapat penghargaan tersebut yaitu: **Patrice Lumumba Sihombing** dan **Andriyatno** dengan Satyalancana Karya Satya XX Tahun, **Astomo Fitra Wibowo**, dan **Mukhlis Mashudi Rahmawan** dengan Satyalancana Karya Satya X Tahun. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini diberikan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.



Redaksi ...

Pengarah: Ida Sundari **Penanggung Jawab:** Aan Hayatullah
Pemimpin Redaksi: Wizar Dien Yatim, **Anggota:** Lusiana Haryanti, M. Septian Wicaksono, Upik Maharani, Vika Armi Gupitasari, Gabriella Simarmata, Wahid Rakhmanto, Kusbiyanto

Alamat Redaksi: Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Telepon: 0561 585349, Fax: 0561 713598, Website: <http://pontianak.bpk.go.id>.
Redaksi menerima tulisan dan foto dari pembaca. Kirim karya anda ke Redaksi Kabar Kalbar melalui email: bpkpontianak@gmail.com

Dari Redaksi



Agustus adalah bulan yang memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia, mengingat perjuangan bangsa ini dalam meraih Kemerdekaan. Sesuai dengan tradisi, seluruh instansi memperingatinya dengan mengadakan upacara bendera. Tema peringatan ke-72 Kemerdekaan RI kali ini adalah "Indonesia Kerja Bersama". Melalui tema tersebut, Presiden RI menyampaikan agar masyarakat Indonesia mengingat kembali budaya gotong royong yang menggambarkan kebersamaan dan kekompakan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pun memiliki agenda penting pada bulan ini, yaitu mewujudkan Zona Integritas. Zona Integritas merupakan salah satu langkah untuk menuju wilayah bebas korupsi, sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu upaya untuk mewujudkan Zona Integritas tersebut melalui sosialisasi internal dan eksternal.

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas kegiatan workshop yang diselenggarakan di Lombok, Mataram terkait percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pertemuan pembahasan. Dalam pertemuan pembahasan dengan Inspektorat se-Kalimantan Barat ini, disusun kesepakatan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK melalui penandatanganan komitmen.

Akhir kata, Dirgahayu Indonesiaku! Merdeka!!!

Daftar Isi

- Halaman 1**
Dari Redaksi
BPK Perwakilan Kalimantan Barat Menuju Zona Integritas
Daftar Isi
- Halaman 2**
Kerjasama Percepatan TLHP
Komitmen Percepatan TLHP
- Halaman 3**
Sambungan Komitmen Percepatan TLHP
Kunjungan Ombudsman Kalimantan Barat
- Halaman 4**
Upacara HUT RI ke-72 Tahun 2017
Redaksi

Berita Utama

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Menuju Zona Integritas



Kamis, 24 Agustus 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selenggarakan kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Dasar BPK. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini Inspektur Utama, **Mahendro Sumardjo**, dan Inspektur Pengawasan Integritas **Selvia Vivi Devianti**. Materi yang disampaikan oleh para narasumber antara lain mengenai Whistle Blowing Systems, Program Pengendalian Gratifikasi, dan Kode Etik

BPK. Tujuan penyelenggaraan acara tersebut salah satunya sebagai langkah untuk mewujudkan Zona Integritas di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, tutur Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Ida Sundari**, dalam sambutannya.

Saat ini BPK RI sudah memiliki sistem pengaduan (*whistle blowing systems*) yang memungkinkan bagi para pegawai untuk memberikan laporan bila terjadi pelanggaran kode etik BPK maupun disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tim Satuan Tugas Kepatuhan Internal (Satgas) menyediakan help desk untuk melayani pengaduan langsung, sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui telepon, layanan pesan singkat (SMS), pos elektronik (Email), Kotak pengaduan, dan PO BOX. Selain itu terdapat pilihan apakah pengirim aduan akan mengungkapkan identitasnya atau tidak. Namun demikian bagi pengirim aduan yang memberikan identitasnya, satgas akan memberikan jaminan kerahasiaan identitas.

Sistem pengaduan tersebut merupakan salah satu alat untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di BPK yang juga menjadi bagian dari proses menuju Zona Integritas. Selain sistem pengaduan, BPK juga menyelenggarakan Program Pengendalian Gratifikasi. Kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu adalah saling memberikan tanda mata. Kegiatan ini menjadi salah satu cara yang mengindikasikan terjadinya suap. Melalui pemberian-pemberian dari pihak yang berkepentingan, dikhawatirkan bahwa BPK sebagai lembaga eksternal pemerintah akan dengan mudah dipengaruhi. Oleh karena itu BPK melalui program pengendalian gratifikasi mengatur jenis-jenis gratifikasi yang wajib lapor dan tidak wajib lapor. Untuk mempermudah pelaporan, BPK membangun aplikasi PPG yang dapat diakses oleh para pegawai BPK.



Sistem pengaduan dan program pengendalian gratifikasi merupakan elemen dari kode etik BPK. Melalui dua kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan. Selanjutnya, melalui sosialisasi ini diharapkan para pegawai BPK Provinsi Kalimantan Barat memahami nilai integritas sekaligus dapat menanamkannya dalam diri masing-masing pegawai. Mewujudkan zona integritas tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemahaman dan penerapan yang baik dari para pegawai sebagai pelaksana kegiatan.[el]



Keja Sama BPK dan Inspektorat Provinsi dalam Percepatan Tindak Lanjut dan Mewujudkan Zona Integritas

Jumat, 25 Agustus 2017, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, **Ida Sundari** mensosialisasikan program percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada para Inspektur Daerah se-Kalimantan Barat. Sosialisasi yang dimoderatori oleh Inspektur Provinsi, Sekundus, ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut komitmen yang sudah ditandatangani antara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat dan Auditor Utama KN VI dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat Tanggal 11 Agustus 2017. Pada kesempatan kali ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa sesuai dengan komitmen tersebut, telah ditetapkan target terkait pencapaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Target percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dibagi menjadi tiga, yaitu untuk hasil pemeriksaan di bawah tahun 2004 mencapai 70%; tahun 2005-2014 mencapai 60%; dan

tahun 2013-2017 mencapai 50% dari posisi terakhir tindak lanjut yang sudah dilaksanakan sampai dengan Semester I Tahun 2017. Berdasarkan data tindak lanjut yang dimiliki oleh BPK, sampai saat ini masih terdapat dua entitas yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di bawah tahun 2004; sedangkan tahun 2005-2012 sebanyak 133 rekomendasi (39,58%), yang artinya ditargetkan sampai dengan akhir tahun ini tinggal 6,35%. Sedangkan tahun 2013-2017 sebanyak 39,58%, dan ditargetkan berkurang 50% sehingga tersisa 19,79%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan untuk rekomendasi di bawah tahun 2004 yang belum ditindaklanjuti segera diselesaikan seluruhnya.

Para Inspektur Daerah dalam kesempatan ini juga menyampaikan hambatan-hambatan dan juga komitmen mereka untuk mendukung percepatan tindak lanjut. Beberapa masalah yang menghambat penyelesaian tindak lanjut antara lain pihak yang terlibat atau yang melakukan pelanggaran sudah meninggal dunia, pihak ketiga yang perusahaannya sudah bubar, atau adanya ketidaksepahaman antara BPK dan entitas. Menanggapi hal tersebut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan agar entitas-entitas yang mengalami hambatan dalam penyelesaian tindak lanjut segera berkonsultasi dengan BPK. BPK akan menyiapkan *help desk* untuk membantu entitas yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tindak lanjut sekaligus sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan jaringan bagi entitas yang akan mengunggah data tindak lanjut ke SIPTL. Dalam acara ini para Inspektur Daerah menyampaikan kesanggupannya untuk ikut berperan serta secara aktif dalam mendorong percepatan tindak lanjut hasil temuan. Beberapa Inspektur Daerah bahkan berinisiatif dengan menggelar kegiatan gelar pengawasan hingga penerbitan SK Tindak Lanjut agar rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat segera diselesaikan.

Selain mengenai percepatan tindak lanjut, Kepala Perwakilan juga menyampaikan mengenai target BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Zona Integritas. Sampai saat ini BPK telah memiliki *Whistle Blowing Systems*, dan Program Pengendalian Gratifikasi yang merupakan elemen penting Kode Etik BPK. Melalui penerapan sistem pengaduan dan pengendalian gratifikasi, diharapkan dapat meningkatkan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan. Namun demikian Zona Integritas tidak akan dapat diraih tanpa adanya dukungan pihak-pihak entitas.

Integritas suatu instansi dalam melaksanakan tugasnya dinilai melalui poling atau jajak pendapat yang dilakukan oleh tim penilai dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Oleh karena itu selain untuk membangun kesepakatan bersama dalam melaksanakan komitmen percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan permintaan kerja sama dari pihak entitas terkait penilaian Integritas tersebut. Diharapkan para entitas dapat memberikan penilaian yang objektif dan dapat mendukung terwujudnya Zona Integritas di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. [el]

Komitmen Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Rabu 16 Agustus 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas program percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut hasil workshop yang diselenggarakan di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat Tanggal 11 Agustus 2017 lalu. Sebagai konsekuensi atas penandatanganan komitmen antara Kepala Perwakilan dengan Auditor Utama (Tortama) KN VI terkait percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berencana untuk mengadakan pengarahannya sekaligus penandatanganan komitmen antara BPK dengan para Inspektorat di seluruh Kalimantan Barat.

Berdasarkan komitmen tersebut, ditetapkan target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

sampai dengan Desember 2017. Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang saat ini berstatus 2 dan 3 atau sedang dalam proses tindak lanjut, dibagi menjadi 3 level berdasarkan periode tahun. Sampai dengan Desember 2017, ditargetkan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bawah tahun 2004 mencapai 70%, tahun 2005-2012 mencapai 60%, dan tahun 2013-2017 mencapai 50%. Untuk Provinsi Kalimantan Barat sendiri, sampai saat ini tindak lanjut yang belum selesai sampai dengan tahun 2004 tidak ada; tahun 2005-2012 sebanyak 133 rekomendasi (39,58%), yang artinya ditargetkan sampai dengan akhir tahun ini tinggal 6,35%. Sedangkan tahun 2013-2017 sebanyak 39,58%, dan ditargetkan berkurang 50% sehingga tersisa 19,79% pada akhir tahun 2017.

Melalui pertemuan ini, pihak BPK dan Inspektorat melakukan koordinasi untuk menyelenggarakan kegiatan pengarahannya terkait komitmen percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan bagi inspektora-inspektorat se-Kalimantan Barat. Dalam kegiatan pengarahannya tersebut juga diharapkan dapat dipetakan permasalahan-permasalahan yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Terkait dengan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, pihak BPK berharap agar entitas dapat menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya sehingga dapat dikategorisasikan ke dalam status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti).

Mengingat target komitmen yang harus dipenuhi pada akhir tahun 2017 ini, dan singkatnya waktu, maka BPK akan mengadakan monitoring secara intensif terhadap pelaksanaan komitmen. Seluruh entitas diharapkan dapat menyerahkan laporan perkembangan tindak lanjut per bulan, sehingga dapat terpantau sejauh mana perkembangan dan masalah-masalah yang ditemui. Selain itu BPK akan menyediakan waktu konsultasi tiap minggunya bagi entitas-entitas yang menemui hambatan dalam percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK maupun mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut untuk hasil pemeriksaan Tahun 2017. Pencapaian target sesuai dengan komitmen yang telah disepakati akan menjadi salah satu prestasi baik bagi entitas terperiiksa maupun BPK. [el]

BPK PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT BERIKAN PENJELASAN TENTANG DANA BOS KEPADA OMBUDSMAN PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT



Pada hari Selasa, 1 Agustus 2017, dua orang perwakilan dari Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, **Tariyah** dan **M. Ridha**, berkunjung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan konsultasi terkait pemeriksaan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sekaligus sebagai pemimpin pertemuan, **Ida Sundari**, Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, **Agvita Windiadi**, Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, **Aan Hayatullah** dan Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan, **Wizar Dien Yatim**.

Dalam pertemuan tersebut, Tariyah menjelaskan bahwa maksud kedatangan Ombudsman ke BPK Perwakilan Kalimantan Barat adalah untuk mengetahui prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan Dana BOS, terutama

apabila terdapat aduan dari masyarakat tentang dugaan penyelewengan Dana BOS. Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, belum ada pemeriksaan khusus yang dilakukan BPK atas pengelolaan Dana BOS. Pemeriksaan atas Dana BOS masih dilakukan ketika BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Subauditorat II, pemeriksaan atas Dana BOS dilakukan sebagai bagian atas pemeriksaan atas pengelolaan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan. Pemeriksaan atas Dana BOS dilakukan untuk melihat kesesuaian antara anggaran dengan realisasi Dana BOS yang diterima tiap-tiap sekolah serta pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana BOS. Terkait dengan adanya aduan dari masyarakat atas dugaan penyimpangan atas pengelolaan Dana BOS, **Agvita** menjelaskan bahwa BPK dapat menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Akan tetapi, sebelum dilakukan PDTT, BPK akan terlebih dahulu membuat kajian dengan mempertimbangkan apakah aduan tersebut telah memuat informasi yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi unsur *cost and benefit*. Atas kajian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan kajian tersebut kepada Auditorat Utama Investigasi (AUI) untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Selain menjelaskan tentang proses pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana BOS, **Agvita** menambahkan hubungan antara BPK dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemeriksaan. Dijelaskan oleh beliau, BPK tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan suatu penyimpangan sebagai tindak pidana. Para APH (dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan) mempunyai kewenangan untuk menentukan sebuah tindak pidana, sedangkan BPK dapat membantu proses hukum dengan melakukan penghitungan kerugian negara (PKN) apabila diminta oleh pihak APH.

Pada akhir pertemuan, Kepala Perwakilan memberikan masukan kepada Ombudsman apabila terdapat aduan masyarakat terkait pengelolaan dana BOS, Ombudsman dapat bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten/Kota karena secara institusional, Inspektorat mempunyai hubungan langsung dengan Dinas Pendidikan pada Kabupaten/Kota sehingga mempermudah jalannya kerjasama.